

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Friere, Paulo. 2000. *Pendidikan Pembebasan*, Jakarta, LP3S.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Basah, Sjachran. 2000. *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Utrecht.E, 2010. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ichtiar
- Manan, Bagir, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*, Makalah tidak Dipublikasikan, Jakarta, 2009, hlm. 8
- Sri Pudyamoko, 2009, *Hukum Perizinan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Effendi, Taufiq. 2004. *Tingkatkan Pelayanan Publik*. Jakarta: Suara Pembaruan.
- Hartono, Sri Redjeki. 2003. *Aspek Keperdataan Pada Pelayanan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrudin, Ateng. 2009. *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*. Jakarta: Gramedia
- Hadjon, Philipus, M., 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ngainun Naim. 2008. *Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan*. Bandung: Graha Pustaka Utama.
- Sianipar, J.PG. 2000. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- HR, Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Amin, 2008. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Muhamad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Pudyatmoko, Sri, 2009. *Perizinan problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta : Gramedia.

Tutik, Triwulan Titik, S.H., M.H., 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Saleh, Moh. Djindang, Moh. Saleh, S.H., 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan Kesembilan*. Jakarta : Ikhtiar baru.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik .

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1988 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.

Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 05 Tanggal 11 Februari Tahun 2008